

Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Ibnul Mubarak Palu

Jihan Salim Al-Amri^{*1}, Rusdin Rusdin², Hamka Hamka³

¹*Manajemen Pendidikan Islam*

^{2,3}*Universitas Islam Negeri datokarama Palu*

Penulis korespodensi: Jihan Salim Al-Amri, Email: jihansalim200@gmail.com

INFORMASI

Received: 26 Juli 2024

Accepted: 25 September

Volume: 3

Issue: 2

DOI:

KATAKUNCI

Kebijakan Pendidikan,
Kurikulum Merdeka Belajar,
Sekolah Dasar Islam Terpadu.

ABSTRAK

Kebijakan Pendidikan Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Ibnul Mubarak Palu telah diimplementasikan oleh pihak sekolah dengan mengusahakan penerapan yang sesuai indikator-indikator Kurikulum Merdeka Belajar, dan mendapat respon baik dari berbagai pihak yang ada di SDIT Ibnul Mubarak khususnya guru dan siswa yang lebih berdampak karena mereka merasakan langsung pada proses pembelajaran, walaupun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pemahaman yang belum merata di kalangan guru, keterbatasan sumber daya, dan adaptasi terhadap perubahan metode pembelajaran. Namun, terdapat juga beberapa faktor pendukung yang membantu proses implementasi, seperti dukungan dari pihak manajemen sekolah dan partisipasi aktif dari orang tua siswa. Dengan menggunakan teori Inovasi dan Difusi dari Everett Rogers, penelitian ini mengidentifikasi tahapan adopsi inovasi yang telah terjadi di SDIT Ibnul Mubarak, Palu mulai dari tahap pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, hingga konfirmasi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi implementasi Kurikulum Merdeka Belajar yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

1. Pendahuluan

Penerapan kebijakan pendidikan dalam kurikulum Merdeka memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik siswa serta lingkungan lokal mereka. Kebijakan ini mendorong terbentuknya kemitraan antara sekolah, orang tua/wali, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Kebijakan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka haruslah disusun dengan cermat dan melibatkan berbagai pihak, seperti guru, orang tua, ahli pendidikan, dan masyarakat setempat, untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutannya. Meskipun memberikan keleluasaan kepada sekolah, penting untuk tetap melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kurikulum ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa standar pendidikan tetap terjaga dan hasil belajar siswa terukur.

Sama halnya dengan kondisi sekolah tempat peneliti melakukan observasi yang bertempat di SDIT Ibnul Mubarak. SDIT Ibnul Mubarak baru berdiri sejak tahun 2018 bahkan belum memiliki lulusan. Sekolah ini terbilang sangat muda dalam sebuah lembaga pendidikan akan tetapi sudah bisa menerapkan kurikulum merdeka di empat kelas yaitu 1, 2, 4 dan 5.

Kebijakan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka di SDIT Ibnul Mubarak terbilang baik dan mendapat respon positif dari berbagai pihak terkait seperti orang tua, siswa dan juga guru, bahkan berdasarkan hasil wawancara dalam observasi peneliti, kebanyakan guru di SDIT Ibnul Mubarak menginginkan penerapan kurikulum merdeka ini akan segera diterapkan di semua kelas dan tidak lagi menggunakan kurikulum sebelumnya, sehingga apa yang didapat oleh siswa kelas 1, 2, 4 dan 5 juga didapatkan oleh kelas 3 dan 6 serta mempermudah guru untuk mengembangkan kegiatan sekolah secara merata menggunakan kurikulum merdeka tersebut.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian dalam mengangkat judul tesis ini, dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam serta menilai perubahan dalam pendekatan pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian hasil belajar siswa sebagai dampak dari Kurikulum Merdeka Belajar.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengenalan Teori Model Adopsi

Model adopsi dan difusi berfokus pada proses di mana sebuah inovasi diperkenalkan, diterima, dan akhirnya diintegrasikan ke dalam praktik sehari-hari oleh individu atau kelompok. Proses ini melibatkan beberapa tahap, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Dalam konteks kebijakan publik, model ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan baru diperkenalkan oleh pemerintah, bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya dalam diterapkan secara luas.

Model Adopsi dan Difusi adalah salah satu teori yang sering digunakan dalam studi kebijakan publik untuk memahami bagaimana kebijakan diadopsi dan menyebar dari satu entitas ke entitas lainnya. Teori ini menjelaskan proses di mana inovasi atau kebijakan baru diadopsi oleh masyarakat atau organisasi.

2.2 Elemen Kunci dari Model Adopsi dan Difusi

Ada beberapa elemen kunci dalam Model Adopsi dan Difusi yang relevan untuk pembahasan kebijakan publik yaitu Inovasi (*Innovation*) dalam kebijakan publik bisa berupa peraturan baru, program pemerintah, atau inisiatif yang dirancang untuk memecahkan masalah publik. Kualitas inovasi sering menentukan tingkat adopsi, kemudian Saluran Komunikasi (*Communication Channels*) proses difusi melibatkan komunikasi tentang inovasi melalui berbagai saluran, seperti media massa, media sosial, seminar, dan workshop, elemen berikutnya Waktu (*Time*) adopsi inovasi tidak terjadi secara instan. Ada tahapan waktu yang dilalui, termasuk pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi, dan Sistem Sosial (*Social System*) inovasi terjadi dalam konteks sistem sosial tertentu yang memiliki norma, nilai, dan hubungan sosial yang mempengaruhi adopsi.

2.3 Tahapan Adopsi Inovasi

Proses adopsi inovasi menurut Rogers dapat dibagi menjadi lima tahapan:

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Tahapan *Knowledge* dimulai ketika individu pertama kali terpapar pada inovasi baru. Paparan ini dapat terjadi melalui berbagai sumber informasi seperti media massa, media sosial, rekomendasi dari teman atau kolega, atau melalui observasi langsung. Pada titik ini, individu belum memiliki pengetahuan mendalam tentang inovasi tersebut; mereka hanya tahu bahwa inovasi itu ada.

b. Persuasi (*Persuasion*)

Tahapan *Persuasion* dimulai ketika individu telah mengumpulkan informasi yang cukup pada tahap pengetahuan dan mulai membentuk sikap terhadap inovasi tersebut. Pada tahap ini, individu tidak lagi fokus pada sekadar memahami apa itu inovasi, melainkan mulai mengevaluasi relevansi dan manfaat inovasi tersebut dalam konteks kehidupan mereka. Sikap yang terbentuk bisa positif atau negatif tergantung pada persepsi individu terhadap inovasi.

c. Keputusan (*Decision*)

Tahap *Decision* dimulai setelah individu melewati tahap Pengetahuan dan Persuasi, di mana mereka telah mengumpulkan informasi dan membentuk sikap terhadap inovasi. Pada tahap ini, individu melakukan konsolidasi informasi yang telah mereka peroleh. Mereka mengevaluasi kembali semua aspek yang telah dipertimbangkan sebelumnya, seperti manfaat, risiko, biaya, dan kompatibilitas inovasi dengan kebutuhan atau nilai-nilai pribadi mereka.

d. Implementasi (*Implementation*)

Tahap implementasi adalah kunci untuk menentukan keberhasilan adopsi inovasi dalam jangka panjang. Tanpa implementasi yang efektif, inovasi mungkin tidak memberikan manfaat yang diharapkan dan dapat menyebabkan kekecewaan atau penolakan dari pengguna. Oleh karena itu, perhatian yang cermat terhadap proses implementasi sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi dapat diterapkan dengan baik dan memberikan dampak positif.

e. Konfirmasi (*Confirmation*)

Pada tahap ini, individu atau organisasi mengevaluasi kembali keputusan mereka untuk mengadopsi inovasi. Mereka mencari informasi tambahan dan umpan balik dari pengguna lain atau sumber terpercaya untuk memastikan bahwa keputusan mereka sudah benar. Jika mereka menemukan bukti yang mendukung manfaat dari inovasi, mereka akan merasa lebih yakin dan mantap dengan pilihan mereka.

2.4 Penerapan Model Adopsi dan Difusi dalam Kebijakan Publik

Dalam konteks kebijakan publik, model ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan baru, seperti reformasi pendidikan atau program kesehatan masyarakat, diadopsi dan diterapkan oleh pemerintah daerah, organisasi, dan masyarakat. Faktor-faktor seperti kepemimpinan, jaringan sosial, dan dukungan politik sangat mempengaruhi proses ini.

Sebagai contoh, dalam kasus adopsi kebijakan energi terbarukan di berbagai wilayah, model ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat adopsi kebijakan tersebut. Proses adopsi mungkin dipengaruhi oleh faktor ekonomi (biaya dan manfaat), sosial (dukungan komunitas), dan politik (dukungan legislatif).

2.5 Tantangan dan Strategi Adopsi Kebijakan

Model Adopsi dan Difusi menawarkan kerangka yang berguna untuk memahami dinamika adopsi dan penyebaran kebijakan publik. Dengan memahami elemen dan tahapan adopsi, pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memastikan penerimaan dan implementasi kebijakan baru yang berhasil. Analisis menggunakan model ini juga membantu dalam mengidentifikasi hambatan potensial dan merumuskan solusi yang inovatif untuk mendorong adopsi kebijakan publik.

2.6 Kebijakan Pendidikan pada Kurikulum Merdeka Belajar

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu yang timbul dalam suatu sistem atau organisasi. Dalam konteks Pendidikan, kebijakan public dapat berupa keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini dapat berupa keputusan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam memilih, mengakses, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja, serta memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan kontekstual.

Konsep kebijakan publik mencakup serangkaian prinsip dan pendekatan yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan dan Tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat dan mencapai tujuan kolektif.

Elemen kebijakan publik seperti *public issue* yakni identifikasi dan definisi masalah atau kebutuhan yang memerlukan intervensi pemerintah, proses merancang solusi untuk masalah yang diidentifikasi. Ini melibatkan penelitian, analisis data, konsultasi ahli dan pemangku kepentingan, serta penyusunan rencana Tindakan. Adopsi kebijakan, dimana tahap ini kebijakan yang dirumuskan disetujui dan diadopsi oleh otoritas berwenang. Penerapan kebijakan yang telah diadopsi melibatkan alokasi sumber daya, pengaturan organisasi, dan pelaksanaan program. Setelah itu evaluasi kebijakan, proses menilai dampak dan efektifitas kebijakan yang diimplementasikan, ini bertujuan untuk mengetahui tercapainya dan dampaknya bagi masyarakat.

2.7 Implementasi Kebijakan

Proses analisis implementasi juga dapat meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan mereka dalam proses analisis, mereka merasa lebih terlibat dan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap kebijakan yang diterapkan. Secara keseluruhan, analisis implementasi kebijakan penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dijalankan dengan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau organisasi yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

Analisis implementasi kebijakan merupakan proses evaluasi yang mendalam terhadap bagaimana suatu kebijakan direalisasikan, sejauh mana tujuan-tujuan kebijakan tercapai, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan yang melibatkan penerapan kebijakan yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata di lapangan.

2.8 Kurikulum Merdeka Belajar

Kurikulum Merdeka Belajar merupakan sebuah inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diluncurkan pada akhir tahun 2019. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dan guru dalam mengembangkan dan menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi pembelajaran.

Kurikulum Merdeka Belajar berfokus pada penguatan kompetensi dasar, pengembangan karakter, dan pemberdayaan guru, serta mendorong partisipasi aktif siswa melalui proyek-proyek yang memperkuat nilai-nilai Pancasila. Dengan pendekatan yang fleksibel dan holistik, kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi tantangan global, sambil tetap berakar pada budaya dan nilai-nilai kebangsaan.

3. Methodologi

Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah SDIT Ibnu Mubarak. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan prosedur analisis tanpa menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa analisis deskriptif. Subjek penelitian ini adalah: Kepala sekolah sebagai informan kunci (*key informan*), Wakil Kepala Sekolah Bidang kurikulum, guru, murid dan juga orang tua murid. Teknik pengumpulan data meliputi: 1) Observasi untuk mengamati perilaku dan aktifitas di lokasi penelitian, 2) wawancara terhadap informan terait, 3) dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen SDIT Ibnu Mubarak.

4. Hasil Penelitian

4.1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Ibnu Mubarak Palu

Kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kemandirian lebih besar kepada sekolah dan guru dalam mengelola pembelajaran, dengan tujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis dan relevan. Kebijakan ini meliputi pendekatan tematik dan kontekstual, penggunaan teknologi, serta beragam bentuk asesmen untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kemampuan siswa. Selain itu, Kurikulum Merdeka mendorong proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kolaborasi dengan dunia usaha dan industri, serta penguatan pendidikan karakter. Dengan mengurangi beban administratif guru dan menyediakan pelatihan yang memadai, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Adapun kebijakan Kurikulum Merdeka yang telah di implementasikan di SDIT Ibnu Mubarak Palu ialah sebagai berikut:

a. Pengurangan Beban Kurikulum

Pengurangan beban kurikulum pada Kurikulum Merdeka diterima positif oleh para *stake holder*. Meskipun ada tantangan dalam penyesuaian awal, manfaat jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan keterampilan holistik siswa diakui oleh semua pihak. Dukungan dan pelatihan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini.

b. Penerapan Asesmen Nasional

Penerapan Asesmen Nasional dalam Kurikulum Merdeka di SDIT Ibnu Mubarak Palu diterima dengan baik oleh semua pemangku kepentingan. Guru merasa asesmen ini memberikan informasi yang berharga untuk perbaikan pengajaran, siswa menemukan pengalaman asesmen yang menantang dan bermanfaat, dan kepala sekolah melihat asesmen ini sebagai alat yang efektif untuk evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Dengan dukungan yang tepat, Asesmen Nasional dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

c. Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*)

Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Kurikulum Merdeka di SDIT Ibnu Mubarak Palu diterima dengan baik oleh semua pemangku kepentingan. Guru merasakan peningkatan dalam keterlibatan dan motivasi siswa, siswa menikmati proses belajar yang lebih interaktif dan relevan, orang tua melihat perkembangan positif dalam keterampilan dan sikap anak mereka, dan kepala sekolah mengapresiasi dampak positif PBL terhadap kualitas pendidikan. Meskipun ada tantangan dalam hal pengelolaan waktu dan sumber daya, dukungan yang tepat dapat memastikan keberhasilan implementasi PBL di sekolah.

d. Pemberdayaan Guru dan Kepala Sekolah

Kurikulum Merdeka membawa banyak peluang dan tantangan bagi guru dan kepala sekolah. Kebebasan dalam metode pengajaran dan otonomi dalam pengelolaan sekolah sangat dihargai, namun adaptasi dengan teknologi dan perubahan metode memerlukan dukungan dan pelatihan yang berkelanjutan. Harapan untuk masa depan adalah terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih inovatif, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan siswa.

e. Pengembangan Karakter dan Keterampilan Hidup

Pengembangan karakter dan keterampilan hidup di lembaga pendidikan sekolah dasar diterima dengan baik oleh guru, kepala sekolah, dan siswa. Guru dan kepala sekolah aktif mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan keterampilan hidup ke dalam pembelajaran dan kegiatan sehari-hari. Siswa merasa bahwa program ini membantu mereka menjadi pribadi yang lebih baik, lebih mandiri, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

4.2 Dampak Terhadap Proses Pembelajaran Dari Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Di SDIT Ibnu Mubarak Palu

Kurikulum Merdeka Belajar memiliki dampak yang baik bagi guru dan peserta didik. Adapun dampak positif bagi guru yaitu guru lebih kreatif dan inovatif dalam metode, media, dan teknik pembelajaran, serta pola pikir guru berubah menjadi lebih kolaboratif dan terfokus pada pembelajaran berdiferensiasi.

Sementara dampak terhadap proses pembelajaran dari implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di SDIT Ibnu Mubarak Palu bagi siswa ialah siswa belajar dengan lebih menyenangkan, mengembangkan keahlian mereka dengan diberinya kebebasan sehingga tidak ada rasa tekanan yang dirasakan oleh siswa maupun sebaliknya, siswa juga lebih antusias saat melaksanakan pembelajaran tatap muka, dan siswa menikmati Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang mendorong kreativitas dan inovasi dalam proyek individu maupun kerja tim.

5. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka yang menjadi kesimpulan akhir sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar telah membawa dampak yang signifikan dalam proses pendidikan dengan menawarkan kebebasan dan kreativitas dalam metode pengajaran. Implementasi kurikulum merdeka di SDIT Ibnu Mubarak Palu memberikan efek positif bagi para guru dan siswa. Adapun dampak positif tersebut ialah:

Dampak implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Ibnu Mubarak Palu bagi guru ialah menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam metode, media, dan teknik pembelajaran, serta dapat mengubah pola pikir guru menjadi lebih kolaboratif dan fokus pada pembelajaran yang berdiferensiasi.

Sementara itu, dampak implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Ibnu Mubarak Palu bagi siswa ialah siswa dapat belajar dengan lebih menyenangkan, mengembangkan keahlian mereka dengan kebebasan, sehingga tidak merasa tertekan, dan siswa lebih antusias saat melaksanakan pembelajaran tatap muka, serta siswa menikmati Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang mendorong kreativitas dan inovasi dalam proyek individu maupun kerja tim.

Referensi

- Barlian, U. C., Solekah, S., & Rahayu, P., "Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Journal of Educational and Language Research*, 1, no.12, (2022).
- Chazali, Situmorang, *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, Social Security Development Institute (SDDI): 2016.
- Diana Serly Hetharion, Beti, *Strategi Belajar Mengajar*, (Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka), 2023.
- Dolong M., J. "Sudut Pandang Perencanaan dalam Pengembangan Pembelajaran". *Inspiratif Pendidikan*, No.5, 2016, 65–76. <https://doi.org/10.24252/ip.v5i1.3213>
- Fadli, Rahmat, "Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar." *Jurnal Elementaria Edukasia* 5, no.2 (Oktober 2022).
- Fatmawati, F., & Yusrizal, Y. "Peran Kurikulum Akhlak dalam Pembentukan Karakter di Sekolah Alam SoU Parung Bogor," *Jurnal Tematik* 10, no. 2 (2020).
- Hadi, L. "Pro dan Kontra Merdeka Belajar," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6, no.4 (2020).